

2

Membangun Ketahanan Sosial di Desa Serakapi: Sebuah Replikasi Model *Building Social Resilience in Serakapi Village: A Model Replication*

Daud Bahransyaf dan Ratih Probosiwi

Peneliti Madya dan Staf B2P3KS, Badiklit Kesos, Kementerian Sosial.

Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1, Nitipuran, Yogyakarta. Telpon (0274) 337265, Fax (0274) 373530.

Email: ¹daudbram@gmail.com dan ²ratihprobo@yahoo.com. Diterima 18 Juni 2013, disetujui 23 Juli 2013.

Abstract

As the expansion area, Serakapi Village needs to get facilities to support the development as its main area, Saneo Village. Strengthening human resources needed to run the village development programs by local social institutions in an attempt to embody social resilience. Through the Development of Village Social Resilience Model, that has been implemented by the Ministry of Social Affairs, social resilience in Serakapi Village was studied of its supporting and handicap factors. The results showed that the formed forum, namely Sabua Ade, had clear organized and planned in the division of social protection, community participation, social conflict prevention, and local wisdom development. This forum has been running well according to the plan despite one issue, funding problem. It's recommended that community social resilience model should be applied in other regions by respecting the typology and character of the villages.

Keywords:

Human Resources Strengthening–Rural Development–Social Community Resilience

Abstrak

Sebagai daerah pemekaran, Desa Serakapi perlu mendapatkan fasilitas untuk mendukung pembangunan seperti daerah induknya, Desa Saneo. Diperlukan penguatan SDM lokal untuk menjalankan program pembangunan desa melalui kelembagaan sosial lokal sebagai wujud pembangunan ketahanan sosial. Melalui implementasi *action research* replikasi model pengembangan desa berketahanan sosial yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI, Desa Serakapi dikaji faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum Tansosmas yang terbentuk, yaitu Sabua Ade, telah diorganisasikan dan direncanakan dengan baik dalam divisi perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian konflik sosial, dan pengembangan kearifan lokal. Forum ini telah berjalan baik sesuai rencana walaupun terdapat kendala pendanaan. Direkomendasikan untuk melakukan replikasi model ini di wilayah lain dengan mempertimbangkan tipologi dan karakter desa.

Kata Kunci:

Penguatan SDM–Pembangunan Desa–Ketahanan Sosial Masyarakat

A. Ketahanan Sosial: Sebuah Pemaknaan

Ketahanan sosial merupakan kemampuan suatu komunitas dalam mengatasi risiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Justika Baharsyah (1999), bentuk ketahanan masyarakat di masa depan adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap total pelayanan sosial yang dinamis, sensitif dan komprehensif, terbentuknya sistem pengembangan sosial untuk masing-masing individu sehingga mereka mampu melakukan penyesuaian otomatis terhadap perubahan sosial yang sangat cepat, sambil meningkatkan kualitas hidup manusia sesuai dengan hak asasi universal. Ketahanan sosial, seperti juga adanya ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan nasional, merupakan suatu konsep yang diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian terhadap konflik dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial (yang kemudian disebut sebagai empat indikator ketahanan sosial masyarakat).

Fenomena empirik di masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini ke empat komponen indikator tersebut mulai luntur, sebagai akibat perubahan atau pengaruh globalisasi. Diperkirakan faktor kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap melemahnya ikatan kesetiakawanan sosial, sehingga perlindungan dan partisipasi sosial terkikis dalam penghidupan dan kehidupan masyarakat, baik masyarakat kota maupun masyarakat desa. Masyarakat relatif mudah terpicu konflik sosial, karena aspirasinya tidak diterima oleh elite politik dan atau pemerintah, yang diungkapkan dengan demonstrasi anarkis, pengrusakan sarana dan fasilitas umum/pemerintah. Nilai dan norma agama dan budaya lokal yang selama ini merupakan kearifan lokal, juga memudar di masyarakat.

Dalam hubungan ini ketahanan sosial dalam berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat/komunitas sangat dibutuhkan. Suatu komunitas memiliki ketahanan sosial bila mampu melindungi secara objektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang perubahan sosial, mampu melaku-

kan investasi sosial dalam jaringan sosial dan mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan (Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2003). Berdasarkan konteks di atas, maka pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan sosial lokal dan jaringan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan sinergis baik melalui pendekatan kelembagaan maupun pendekatan fungsional kultural agar mampu meningkatkan daya tahan sosial masyarakat. Ketahanan sosial masyarakat akan tercipta bilamana suatu kondisi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat membentuk sistem pengembangan sosial dan adaptasi sosial, sehingga berkemampuan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan sosial dalam pembangunan sosial.

Implementasi terwujudnya desa berketahanan sosial, dilakukan di Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam bentuk replikasi model "Pemberdayaan Pranata Sosial dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial" yang terdapat di masyarakat atau komunitas lokal berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 12/HUK/2006. Desa Serakapi dipilih secara purposif, selain direkomendasikan oleh Dinas Sosial setempat, Desa Serakapi merupakan pemekaran Desa Saneo pada tanggal 19 Mei 2010, dengan alasan wilayah desa terlalu luas. Desa ini secara definitif ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2012, dengan pemilihan Kepala Desa pada tanggal 1 Maret 2012 dan dilantik secara resmi pada tanggal 19 April 2012. Sampai dengan bulan Mei 2012, struktur organisasi desa Serakapi sudah terbentuk, namun kantor desa belum terwujud. Dengan segala keterbatasan yang dihadapinya, Desa Serakapi dikategorikan sebagai desa tertinggal.

Proses pemberdayaan masyarakat masih memulai pergerakannya, dengan usia yang masih sangat muda dan fasilitas yang terbatas, desa ini berusaha membangun wilayahnya paling tidak sejajar dengan desa induknya. Dibutuhkan pemenuhan fasilitas-fasilitas dan sumber daya untuk mendukung usaha ini. Penerapan model pengembangan desa berketahanan so-

sial di wilayah ini diharapkan mampu membantu desa. Penelitian ini mencoba mengetahui implementasi atas replikasi model yang dilakukan di desa ini selain juga untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan replikasi model ini.

B. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Pemberdayaan pada dasarnya merujuk pada penguatan daya (*empowering*), yaitu peningkatan kondisi tidak berdaya (*powerless*) menjadi berdaya (*powerfull*) (Melly G. Tan, 1977). Kinerja dan replikasi pemberdayaan kelembagaan sosial lokal yang mengacu Kepmensos RI Nomor 12/HUK/2006 dapat dicermati dalam dua bentuk kinerja, yaitu kinerja proses (*process performance*) dan kinerja hasil (*outcome performance*) dari pemberdayaan itu sendiri.

Kinerja proses dalam penelitian ini adalah pemberdayaan kelembagaan sosial lokal yaitu fungsionalisasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial lokal yang terdiri atas kegiatan: memperkenalkan ketahanan sosial masyarakat ke desa oleh tim peneliti dan para fasilitator; menumbuhkan kelompok ketahanan sosial masyarakat di desa; identifikasi potensi, sumber, dan masalah sosial yang terdapat di desa tersebut oleh kelompok ketahanan sosial masyarakat; menyusun rencana aksi setelah menganalisis prioritas masalah sosial yang dipilih dan organisasi kerja kelompok ketahanan sosial masyarakat; dan implementasi rencana aksi kelompok ketahanan sosial masyarakat bersangkutan. Kinerja hasil pemberdayaan kelembagaan sosial lokal dinilai dari terwujudnya desa berketahanan sosial dalam dimensi indikator ketahanan sosial masyarakat yaitu: perlindungan sosial kelompok rentan; peningkatan partisipasi masyarakat; pengelolaan konflik sosial/tindak kekerasan di tingkat lokal; dan pemeliharaan kearifan lokal.

Konsep lembaga sosial selanjutnya digunakan dalam penelitian ini meskipun model yang direplikasi adalah pemberdayaan pranata sosial. Hal ini disebabkan lembaga yang ada di masyarakat desa lebih dipandang secara sosiologis. Pranata sosial lebih banyak digu-

nakan dalam tataran antropologis yang lebih membutuhkan kejelian dan waktu yang lama dalam pengkajiannya. Konsep lembaga sosial dirasa lebih sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu memberdayakan masyarakat desa melalui badan atau organisasi yang menjalankan sistem norma atau aturan mengenai aktivitas masyarakat (pranata). Pranata sosial sifatnya lebih konseptual, dimana eksistensinya hanya dapat dipahami secara imajinasi dan nalar sebagai konsep yang ada dalam pikiran.

Secara sosiologis, lembaga sosial merupakan sistem norma yang memiliki tujuan tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Mengacu pada Kepmensos RI Nomor 12/HUK/2006, kelembagaan sosial lokal adalah suatu sistem nilai dan norma yang mengatur tata hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat lokal. Kelembagaan sosial lokal berfungsi sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku menghadapi permasalahan kehidupan dalam masyarakat lokal, menjaga keutuhan masyarakat (integrasi), sebagai kontrol sosial. Pandangan lain mengungkapkan bahwa kelembagaan sosial lokal merupakan sistem nilai dan norma yang berwujud pada pendirian organisasi sosial sebagai sentra warga masyarakat lokal menjalankan hak dan kewajiban ketika mengimplimentasikan nilai dan norma sebagai acuan kehidupan bersama (Rusmin Tumanggor, 2006).

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, yaitu individu, keluarga dan komunitas, memungkinkan untuk melakukan tindakan/aksi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemaslahatannya (*quality of life and wellbeing*). Oleh karena itu, penggunaan strategi pemberdayaan kelembagaan sosial lokal dalam program pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai implikasi agar setiap kegiatan yang diciptakan bertumpu pada proses yang sifatnya partisipatif (terakomodasinya aspirasi, terbuka pilihan-pilihan dan terlibatnya semua komponen masyarakat/*stakeholders*). Menurut Harry Hikmat (2004) kondisi tersebut dapat ditunjukkan melalui aktualisasi diri (ekspresi diri yang dihargai dan dijadikan pertimbangan keputusan kelompok) dan koaktualisasi eksistensi (adanya aktualisasi bersama dalam kelompok berimplikasi pada

eksistensi kelompok komunitas/masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial di lingkungannya.

C. Replikasi Model Desa Berketahanan Sosial

Replikasi Model Desa Berketahanan Sosial di Desa Serakapi diharapkan dapat mentransformasikan kondisi awal ketahanan sosial masyarakat (kondisi awal) menjadi kondisi ketahanan sosial masyarakat optimum (kondisi akhir). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *Action Research* yang bertujuan memberikan strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Prinsip *Action Research* yang digunakan adalah merumuskan masalah dan merencanakan tindakan; melaksanakan tindakan dan pengamatan/*monitoring*; refleksi hasil pengamatan; dan perubahan/revisi perencanaan untuk pengembangan selanjutnya. Rancangan penelitian merupakan Quasi Eksperimen dalam bentuk “*one group pre-test post-test*”. Model Desa Berketahanan Sosial dapat dilihat pada Tabel 1.

Pada penelitian ini, variabel bebas atau *independent variable* (X) adalah model Desa Berketahanan sosial yang akan dilihat melalui kemampuan forum dalam hal: Tingkat pemahaman masyarakat tentang ketahanan sosial;

Perlindungan sosial terhadap kelompok PMKS; Partisipasi masyarakat dalam organisasi lokal; Pengendalian terhadap konflik sosial; Kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial.

Variabel terikat atau *dependent variable* (Y) pada penelitian ini adalah kondisi kelompok sasaran/anggota keluarga/komunitas di lokasi penelitian yaitu kondisi perlindungan sosial bagi kelompok sasaran/anggota keluarga/komunitas; kondisi partisipasi masyarakat dari kelompok sasaran/anggota keluarga/ komunitas; kondisi pengendalian konflik/tindak kekerasan pada kelompok sasaran/anggota keluarga/ komunitas; dan kondisi kearifan lokal kelompok sasaran/ anggota keluarga/komunitas dalam mengelola sumber daya alam dan sosial serta penanganan bencana alam dan sosial.

Penentuan lokasi penelitian ditentukan secara purposif, di Desa Serakapi Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa jumlah penduduk relatif lebih besar dibandingkan dengan desa lainnya yang diprediksikan memiliki Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang relatif lebih kompleks; jangkauan lokasi lebih mudah dibanding dengan desa yang lain, sehingga akan memperlancar keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pasca treatment dengan pertimbangan waktu, tenaga dan dana; dan kenyataan bahwa desa tersebut merupakan salah satu desa ter-

Tabel 1.
Model Desa Berketahanan Sosial

No	Materi Pelatihan	Penyaji	Target yang Dicapai	Keterangan
1	Perlindungan Sosial bagi kelompok PMKS	Dinas sosial	Tersosialisasinya jenis pelayanan sosial dasar guna mewujudkan perlindungan sosial bagi kelompok PMKS	Peserta paham ttg: 1. Jenis pelayanan sosial dasar 2. Kemampuan jangkauan pelayanan sosial dasar 3. Keberlangsungan pelayanan sosial dasar
2	Partisipasi masyarakat dalam organisasi lokal	Dinas Sosial	Termotivasinya warga/ peserta dalam keterlibatan berorganisasi lokal	Peserta tergerak/sadar dalam kegiatan orsos lokal/kelembagaan sosial
3	Pengendalian terhadap konflik sosial	Kepolisian/ Praktisi hukum/ Kesbanglinmas	Tersosialisasinya pemahaman peserta dalam mengendalikan terhadap konflik sosial	Peserta terlibat & cepat merespon dalam pengen dalian terhadap konflik sosial
4	Kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial	Bappeda	Tersosialisasinya kearifan lokal dlm mengelola sumber daya alam dan sosial	Peserta mampu melibatkan kearifan lokal yg ada guna mewujudkan Desa Berketahanan Sosial

tinggal serta lokasi tersebut adalah daerah yang dapat memenuhi kriteria kebutuhan pelaksanaan model pengembangan desa berketahanan sosial. Keterdapatan sejumlah kelembagaan sosial lokal yang secara potensial dapat di-dayagunakan dan diberdayakan sebagai agen ketahanan sosial dan kepemilikan implikasi bagi menguatnya ketahanan sosial masyarakat membuat desa ini menarik untuk dijadikan lokasi penelitian dan dapat menjamin kepastian diperolehnya data yang benar sesuai kriteria.

Penelitian ini didasarkan pada kelembagaan sosial dan *stakeholders* terkait. Kelembagaan terdiri atas lembaga sosial yang tumbuh secara tradisional di lingkungan masyarakat; lembaga sosial yang tumbuh dan difasilitasi pemerintah, baik yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, kesehatan (Posyandu), Pendidikan, dan Kepemudaan (Karang Taruna); serta lembaga adat, yang dipatuhi masyarakat ter-

hadap nilai dan norma, aturan-aturan lokal, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku sebagai penuntun perilaku sosial pada kehidupan masyarakat lokal. *Stakeholder* (Pemangku Kepentingan) meliputi tokoh masyarakat, baik yang bergerak dalam bidang keagamaan, adat, kemasyarakatan, kepemudaan, kewanitaan, pemerintah lokal, dunia usaha, dan Perguruan Tinggi. Sasaran tersebut diambil sebanyak 30 (tiga puluh) orang atau sesuai dengan kebutuhan setempat sebagai pranata yang nantinya diberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan selama 4 (empat) hari kegiatan.

Teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan pemberdayaan ini dilakukan melalui *testing*, wawancara, observasi dan telaah dokumentasi (data sekunder). Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Rancangan analisis penelitian secara lebih terperinci dapat dilihat pada Diagram 1.

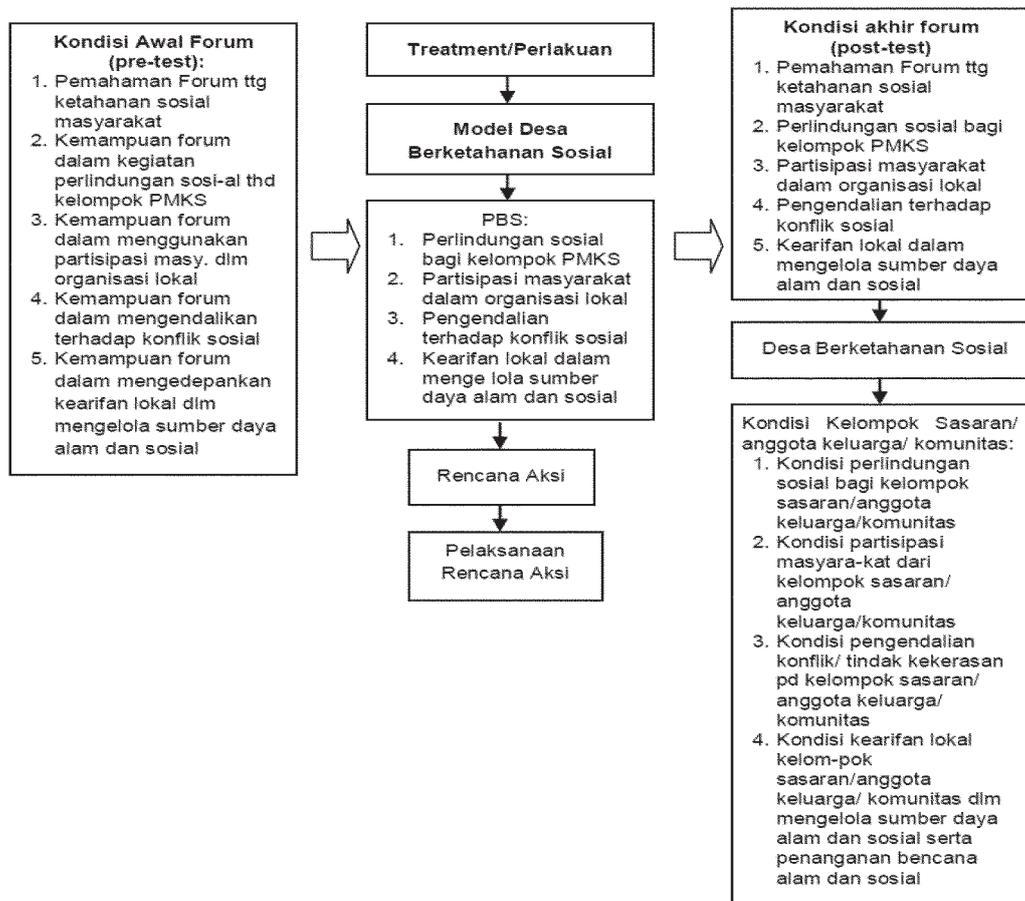


Diagram 1. Rancangan Analisis Penelitian

D. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

1. Karakteristik Peserta Pemberdayaan:

Untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat desa, dibutuhkan upaya pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan kepada pengurus lembaga sosial lokal yang ditunjuk sesuai dengan kriteria sasaran yang telah ditetapkan. Peserta berasal dari beberapa organisasi/kelembagaan sosial lokal, seperti karang taruna 5 orang (16,67 persen), tokoh masyarakat 6 orang (20,00 persen), tokoh pemuda 6 orang (20,00), BPD dan LSM masing-masing 4 orang (13,33 persen), dan lainnya tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2.
Asal Organisasi/Kelembagaan Sosial

No	Asal Organisasi /Kelembagaan Sosial	f	persen
1	Karang Taruna	5	16,67
2	Tokoh Masyarakat	6	20,00
3	Tokoh Pemuda	6	20,00
4	BPD	4	13,33
5	LSM	4	13,33
6	Himpunan Mahasiswa dan Pemuda	3	10,00
Jumlah		30	100,00

Generasi muda sebagai ujung tombak pembangunan perlu mendapat perhatian yang lebih dalam proses pembangunan. Pelibatan generasi muda dalam proses pemberdayaan ini diwujudkan dengan partisipasi karang taruna, tokoh pemuda, dan himpunan mahasiswa serta pemuda. Ide-ide kreatif generasi muda diharapkan mampu membawa perubahan sesuai dengan tuntutan jaman. Ditinjau dari usia peserta, sebagian besar berusia produktif yakni antara 21 – 40 tahun (66,67 persen), peserta yang berusia 41–60 tahun ada 7 orang (23,33 persen), dan ada seorang peserta yang berusia relatif muda yakni 20 tahun, dan diatas 61 tahun ada 2 orang, tetapi masih aktif, lincah, gesit dan mau bekerja untuk kegiatan sosial. Hal ini dikarenakan proses pemberdayaan membutuhkan kegesitan serta keuletan dari fasilitator (masyarakat yang diberdayakan) karena merupakan aktor utama dalam proses pemberdayaan

masyarakat selanjutnya. Untuk jelasnya seperti tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3.
Peserta Menurut Usia

No	Usia (Tahun)	f	persen
1	< 20	1	3,33
2	21-40	20	66,67
3	41-60	7	23,33
4	>60	2	6,67
Jumlah		30	100,00

Bila ditilik dari pendidikan, peserta pemberdayaan ini sebanyak 16 orang berpendidikan tamat SLTA, kemudian 7 orang (23,33 persen) adalah tamatan SLTP, dan masing-masing 3 orang (10,00 persen) tamatan SD dan Sarjana. Hal ini sangat terkait dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat desa yang memang didominasi lulusan SMA. Namun hal ini cukup memadai, karena lulusan SMA atau sederajat dianggap telah mampu berpikir secara rasional dan memiliki landasan pengetahuan yang cukup untuk menerima materi pemberdayaan dengan baik. Adanya peserta yang merupakan sarjana ini memang merupakan pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan baik dalam organisasi olah raga, kesenian dan keagamaan. Mereka ini merupakan tokoh pemuda desa yang berkeinginan desa Serakapi menjadi desa yang maju dalam segala sektor. Dan ini terlihat dari antusias, dinamika dan semangat mereka dalam mengikuti pemberdayaan. Kondisi pendidikan peserta ini dapat diperhatikan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Peserta menurut Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	f	persen
1	SD	3	10,00
2	SMP	7	23,33
3	SMA	16	53,33
4	D3	1	3,33
5	S1	3	10,00
6	Himpunan Mahasiswa dan Pemuda	3	10,00
Jumlah		30	100,00

Mata pencaharian para peserta pemberdayaan tidak begitu beragam, hanya ada empat jenis pekerjaan yang ditekuni yaitu petani sebanyak 23 orang (76,66 persen), ibu rumah tangga sebanyak 3 orang (10,00 persen), aparat pemerintah desa (kadus) sebanyak 2 orang (6,67 persen), dan guru sebanyak 2 orang (6,67 persen). Mayoritas petani di desa Serakapi merupakan petani padi (padi ladang), petani jagung dan kacang hijau yang merupakan komoditi andalan desa.

Tabel 5
Peserta Menurut Pekerjaan (N=30)

No	Jenis Pekerjaan	f	persen
1	Petani	23	76,66
2	Ibu Rumah Tangga	3	10,00
3	Kepala Dusun	2	6,67
4	Guru Tidak Tetap	2	6,67
Jumlah		30	100,00

2. **Pelaksanaan Pemberdayaan:** Tim Peneliti, fasilitator, pendamping forum dan panitia pemberdayaan melakukan penyamaan persepsi dan hal lainnya untuk kelancaran dan mendukung kegiatan pemberdayaan. Selanjutnya membuat jadwal kegiatan selama 4 hari untuk kegiatan bimbingan sosial yang telah ditentukan untuk diterapkan pada perlakuan terhadap peserta pemberdayaan.

Peserta pemberdayaan dikelompokkan menjadi empat kelompok atau divisi sesuai dengan empat indikator ketahanan sosial yaitu kelompok *partisipasi sosial*, kelompok *perlindungan sosial*, kelompok *konflik sosial* dan kelompok *kearifan lokal*. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pengurus forum/kelompok, dan inisial forum/kelompok, setelah personil forum terbentuk, dalam hal ini ketua dan sekretaris forum memandu kegiatan selanjutnya yakni simulasi tentang pemahaman ketahanan sosial masyarakat, pemetaan wilayah desa yaitu peta sosial dan pemetaan terhadap potensi kelembagaan, sistem sumber, PMKS, wilayah-wilayah bermasalah maupun wilayah-wilayah berpotensi. Masing-masing kelompok/divisi diminta

untuk mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di lingkungannya menggunakan langkah-langkah MPA (*Metode Partisipatori Assesment*). Demikian juga masing-masing kelompok untuk memilih prioritas masalah sosial yang nantinya akan ditindak lanjuti melalui pemberdayaan. Kemudian fasilitator menyimpulkan dan memperkuat hasil identifikasi masing-masing kelompok.

Tahapan berikutnya adalah menentukan pemetaan potensi, dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada di desa Serakapi, peserta pemberdayaan diajak untuk berdiskusi membuat peta sosial/*mapping* tentang kondisi desanya. Selain itu, diadakan diskusi untuk menentukan PSKS menjadi prioritas untuk mendukung dalam mengatasi PMKS yang harus segera ditangani. Menggambar peta sosial baik itu tentang sarana prasarana, sarana jalan, jembatan, pendidikan, perekonomian/ pasar/warung/ toko, kesehatan, perkebunan dan sarana pendukung lainnya yang ada di desa, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan mudah. Kemudian pemetaan masalah sosial sebagai kantong-kantong PMKS, antara lain masalah kemiskinan, pemukiman kumuh, anak/remaja nakal, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan masalah sosial lain yang ada di desa tersebut. Hasil identifikasi disajikan dalam matrik kegiatan, selanjutnya disampaikan oleh masing-masing kelompok/divisi untuk ditanggapi oleh kelompok lainnya, didampingi dan dipandu oleh pendamping forum. Fasilitator, kemudian menyimpulkan dan memperkuat hasil diskusi kelompok tentang potensi dan sumber yang ada.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan rencana Aksi (*Action Plan*) atau program kerja. Penyusunan program kerja tersebut meliputi empat indikator ketahanan sosial yang masing-masing tersusun dalam empat devisi, di mana masing-masing devisi menentukan prioritas masalah yang akan ditangani untuk dapat dilaksanakan selama 5 bulan kedepan. Rencana aksi tersebut disusun dalam suatu matrik program kerja yang meliputi kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran, pihak yang terkait, langkah-

langkah kegiatan, jadwal kegiatan, biaya dan sumber biaya, penanggung jawab serta hasil kegiatan yang akan dicapai. Semua peserta terlibat aktif untuk menyusun rencana aksi, bahkan mereka sepakat menyelesaikan tugas tersebut di luar jam pelatihan/pemberdayaan. Program kerja forum yang telah mereka sepakati. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi tentang rencana aksi atau program kerja forum oleh pengurus forum atau ketua forum.

3. Model Pengembangan Desa Berketahanan Sosial Pemberdaya Kelembagaan Sosial Lokal:

Model desa berketahanan sosial tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12/HUK/2006 terbukti mampu memberdayakan kelembagaan sosial lokal. Kemampuan model tersebut harus diikuti oleh beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh tim peneliti, dan telah dilakukan aksi di beberapa daerah. Penetapan dan penyamaan persepsi dengan para fasilitator, penunjukkan tenaga pendamping, penetapan kriteria lokasi dan sasaran pemberdayaan (dalam hal ini perwakilan pengurus lembaga/organisasi lokal) dan modul pemberdayaan menjadi kunci pokok keberhasilan pemberdayaan. Menciptakan kepercayaan antara tim peneliti dan peserta pemberdayaan merupakan kunci keberhasilan berikutnya, karena ketahanan sosial masyarakat diciptakan dari masalah kesejahteraan sosial yang ada dengan memanfaatkan potensi dan sumber sosial lokal yang dituangkan dalam rencana aksi untuk 5 bulan, sebagai aksi yang akan dilakukan oleh forum yang terbentuk. Artinya program yang dibuat oleh forum merupakan *bottom up*, tim peneliti dan fasilitator serta unsur Dinas Sosial hanya memfasilitasi terwujudnya program aksi, termasuk dalam realisasi pelaksanaan rencana aksi tersebut. Tahapan yang menjadi prosedur dalam membentuk desa berketahanan sosial sebagai berikut.

a. **Persiapan:** Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan ini meliputi: **Penyiapan petugas:** petugas yang harus disiapkan adalah tenaga yang

aktif pada kegiatan masyarakat (*community worker*). **Penyiapan lapangan:** penyiapan lapangan kegiatan awal yang dilakukan adalah melakukan studi kelayakan daerah yang akan dijadikan sasaran. mengurus perizinan dari pihak terkait.

- b. **Pelaksanaan Pengembangan:** Pada pelaksanaan pengembangan, kegiatan yang dilakukan berupa: **Pemetaan kondisi awal ketahanan sosial masyarakat.** Pemetaan dilakukan dengan mengumpulkan data, baik melalui observasi, wawancara mendalam, maupun pengisian instrumen sebagai alat ukur. **Pendataan awal** dilakukan untuk memahami kondisi awal komunitas lokal terhadap dimensi indikator ketahanan sosial masyarakat lokal sebelum intervensi (pengembangan) sosial dilakukan. **Pelaku pemetaan** adalah petugas masyarakat (*community worker*), perwakilan pranata sosial dan pendamping.
- c. **Pembekalan atau penguatan:** Pembekalan diberikan pada fasilitator daerah, yang merupakan perwakilan dari Instansi sosial kabupaten, instansi Bappeda dan instansi lainnya sesuai dengan kondisi lokasi atau yang disarankan oleh pemerintah daerah setempat. **Materi pembekalan** adalah materi yang terdapat pada modul bimbingan sosial yang berisi tentang permasalahan kesejahteraan sosial, penggalan sistem sumber, konsep ketahanan sosial masyarakat, perencanaan partisipatif.
- d. **Pengungkapan Masalah (*assesment*):** Dalam pengungkapan masalah, sasaran/forum dilibatkan secara aktif untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan serta potensi yang dimiliki masyarakat. Masalah sosial yang ditemukan akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya yaitu tahap perencanaan, yang menjadi bahan kegiatan pada rencana aksi. **Metoda yang digunakan** pada tahap ini adalah diskusi kelompok terfokus dan curah pendapat. Untuk menggambarkan kondisi suatu

- desa, dapat pula digunakan beberapa teknik yang bisa digunakan yaitu PRA (*Participatory Rural Appraisal*), seperti menggambarkan peta, masalah sosial, dan potensi masyarakat.
- e. Perencanaan alternatif program atau kegiatan: Dalam proses ini tim peneliti bertindak sebagai fasilitator yang membantu forum berdiskusi mengenai program dan kegiatan yang tepat dan dapat dilaksanakan.
 - f. Penyusunan rencana aksi: Rencana aksi yang akan dilakukan dalam pengembangan masyarakat diformulasikan secara tertulis. Penyusunan rencana aksi dimulai dari perumusan program, tujuan yang akan dicapai, indikator keberhasilan, langkah-langkah kegiatan, pembentukan tim kerja, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan, identifikasi sarana dan prasarana pendukung, serta mobilisasi sumber untuk ketercapaian program peningkatan ketahanan sosial masyarakat.
 - g. Pembentukan jejaring: Pembentukan jejaring ini dibutuhkan sebagai media forum untuk menjadikan mitra kerja dalam melaksanakan rencana aksi, dan keberlanjutan kerja forum dimasa mendatang.
 - h. *Monitoring* dan *Evaluasi*: *Monitoring* dilakukan oleh tim peneliti pada bulan ketiga pelaksanaan rencana aksi. Tujuan *monitoring* adalah memantau dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi komunitas lokal selama tahap pengembangan berjalan. Untuk melihat keberhasilan implementasi model, maka dilakukan evaluasi pada bulan ke lima. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran tingkat ketahanan sosial masyarakat setelah forum tansosmas melakukan aksi peningkatan tansosmas selama lima bulan. Evaluasi dilakukan oleh tim peneliti pada bulan ke lima, kegiatan yang dilakukan meliputi, pengisian instrumen *post-test* untuk memperoleh gambaran tentang pemahaman forum tentang ketahanan sosial, di tiga

lokasi pemberdayaan. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan secara partisipatif terhadap forum tansosmas dan tenaga pendamping. Metoda yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi ini adalah Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*), wawancara mendalam, observasi, maupun melalui kajian terhadap catatan forum/kelompok dan pendamping forum/kelompok.

Hasil pengukuran terhadap *pre-test* dan *post-test* terhadap personil forum tansosmas (30 orang per lokasi kabupaten) terhadap pemahaman empat indikator ketahanan sosial masyarakat, yaitu perlindungan sosial bagi kelompok PMKS, pengendalian terhadap konflik sosial dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial, dapat diketahui melalui Tabel 6 dan uraian berikut ini.

Sebelum pemberdayaan, dari 30 peserta, sebanyak 6,67 persen-33,33 persen terlibat dalam perlindungan sosial bagi kelompok PMKS, dalam pengendalian konflik sosial sebanyak 6,67 persen-23,33 persen, dalam pengelolaan kearifan lokal terhadap sumber daya alam dan sosial sebanyak 6,67 persen-20 persen.

Sesudah pemberdayaan, dari 30 peserta, sebanyak 86,67 persen-96,67 persen terlibat dalam perlindungan sosial bagi kelompok PMKS, dalam pengendalian konflik sosial sebanyak 50 persen - 83,33 persen, dalam pengelolaan kearifan lokal terhadap sumber daya alam dan sosial sebanyak 66,67 persen-70 persen.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberdayaan berjalan efektif meliputi tingkat perlindungan sosial, partisipasi sosial, penyelesaian konflik, dan kearifan lokal. Keefektifan tersebut ditunjukkan melalui uji beda mean yang dilakukan sebelum dan sesudah pemberdayaan. Terdapat perbedaan yang jelas antara kemampuan personil forum sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal yang

Tabel 6
Analisis Uji T-Test Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator	Nilai T	P	Mean		Hipotesa	Keterangan
				Sebelum	Sesudah		
1	Perlindungan Sosial	-27,004	0,000	19,333	28,033	Diterima	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat signifikan • Efektif
2	Partisipasi Sosial	-10,033	0,000	3,800	5,067	Diterima	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat signifikan • Efektif
3	Penyelesaian Konflik	-21,631	0,000	11,933	16,133	Diterima	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat signifikan • Efektif
4	Kearifan Lokal	-13,000	0,000	5,867	8,033	Diterima	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat signifikan • Efektif

salah satunya adalah komitmen dari masyarakat dan *stakeholders* untuk ikut secara aktif dalam program pemberdayaan ini.

- i. **Terminasi:** merupakan tahap “pemutusan” hubungan secara formal antara pemberi program dengan komunitas sasaran, yakni forum tansosmas. Terminasi dalam suatu program pemberdayaan masyarakat dilakukan bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri atau mampu melakukan upaya pemecahan/penanganan masalah kesejahteraan sosial, tetapi lebih karena proyek sudah harus dihentikan karena jangka waktu yang ditentukan secara administratif sudah selesai. Oleh karena itu, secara formal dalam rangka pembinaan forum tansosmas yang sudah terbentuk selanjutnya diserahkan kepada instansi terkait mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, bahkan bila diperlukan sampai dengan tingkat provinsi.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu menerima dengan baik pengalihan fungsi Forum Tansosmas Sabua Ade yang telah terbentuk dan eksis di masyarakat desa. Pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten, melakukan pembinaan dan menjadikan mitra kerja dalam penanganan PMKS, dan memfasilitasi terwujudnya desa berketahanan sosial pada tahun depan. Begitu pula dengan pemerintahan desa dan keca-

matan, memfasilitasi Forum Tansosmas Sabua Adea dalam rangka menciptakan desa berketahanan sosial, melalui program kerja yang selama ini sudah mereka lakukan, dan mensinergikan dengan program pembangunan desa yang ada di tingkat Desa dan Kecamatan.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Replikasi Model

Dalam sebuah proses perubahan masyarakat, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Sama halnya dengan proses pemberdayaan yang dilakukan di Desa Serakapi, berikut adalah faktor pendukung dan penghambat dalam proses replikasi model desa berketahanan sosial.

Dalam pelaksanaan replikasi model ini, pemerintah daerah, khususnya dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui perwakilan kelembagaan/organisasi sosial lokal dalam menciptakan ketahanan sosial masyarakat. Selain itu niat baik camat, kepala desa, dan Instansi terkait lainnya dalam mendukung program juga sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program. Keterlibatan fasilitator, khususnya Bappeda dan Kesbanglinmas, secara tidak langsung telah menjadi jejaring kerja yang mendukung dan mengembangkan keberlangsungan kegiatan forum tansosmas. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat serta tokoh masyarakat dalam mendukung keberadaan forum tansosmas dibuktikan melalui kerja bakti yang di prakarsai oleh forum dalam pembenahan jalan dan bersih lingkungan, pen-

dataan PMKS, penyelenggaraan penyuluhan kepada remaja tentang narkoba dan minuman keras. Hal ini tentu sangat mendukung keberhasilan dan keefektifan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan desa berketahanan sosial.

Disamping faktor pendukung pelaksanaan program, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat pelaksanaan program terutama mengenai keaktifan anggota forum dan juga keterbatasan dana yang dimiliki forum. Keterbatasan jejaring kemitraan dan kerjasama dalam forum membuat penggalangan dana dari luar forum sedikit terhambat. Faktor ekonomi internal anggota forum membuat dana internal terbatas dan juga fokus anggota forum sedikit terpecah karena harus memenuhi kebutuhan ekonomi pribadi.

F. Gagasan Akhir

Dalam proses replikasi model yang dilaksanakan di Desa Serakapi ini, pemahaman peserta pemberdayaan (personil forum tansosmas) terhadap 4 indikator tansosmas yaitu perlindungan sosial, partisipasi sosial, penyelesaian konflik, dan kearifan lokal terbukti signifikan, artinya pasca pembekalan oleh fasilitator membawa perubahan pengetahuan tentang indikator ketahanan sosial masyarakat dan upaya yang diperlukan untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat, khususnya di lingkup desa. Forum Ketahanan Sosial Masyarakat dapat menjadi mitra kerja lapangan bagi Dinas Sosial Provinsi/ Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan hasil dan keefektifan program, diperlukan pemantapan tenaga pendamping oleh unit teknis agar forum memiliki kemampuan menggerakkan organisasi dan program kegiatan tetap berjalan dan eksis dalam menciptakan ketahanan sosial masyarakat. Replikasi model desa berketahanan sosial ini dapat dilakukan pada wilayah kabupaten lain dengan mempertimbangkan tipologi dan karakter desa yang akan dijadikan lokasi replikasi sebagai salah satu metode pemberdayaan masyarakat.

Pustaka Acuan

- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- . 2002. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ahmad Suhendi, dkk. 2009. *Pengembangan Desa Berketahanan Sosial melalui Pemberdayaan Pranata Sosial (replikasi model di empat provinsi)*. Jakarta: Pusbangtansosmas Departemen Sosial RI
- Astuti, Mulia, dkk. 2006. *Replikasi Model Pemberdayaan Pranata Sosial, Menuju Desa Berketahanan Sosial*. Jakarta: Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos-Departemen Sosial RI.
- Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. 2003. *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Departemen Sosial RI
- Biithe Mikkelsen, 1999, *Pengembangan Masyarakat di Miangas*. Jakarta: Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos Departemen Sosial RI
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu, *Statistik Daerah Kecamatan Woja tahun 2010*.
- Chusnan Yusuf, 2002, *Ketahanan Sosial Masyarakat Dalam Perspektif pembangunan Kesejahteraan Sosial (dalam Sosialisasi Program Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat)*, Jakarta, Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos-Dep. Sosial RI.
- Departemen Sosial RI. 2006. *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12/HUK/2006 Tentang Model Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

- Endro Winarno, dkk. 2001. *Ujicoba Pola Pengentasan Keluarga Miskin Berbasis Masyarakat di Provinsi Lampung*. BPKS: Yogyakarta
- Harry Hikmat, 2004, *Dimensi Indikator Ketahanan Sosial Masyarakat*, Jakarta, Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos-Dep. Sosial RI.
- Idrus, Muhammad, 2007, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu sosial (pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta, UUI Press.
- Justika Baharsyah. 1999. *Menuju Masyarakat yang Berketahanan Sosial Pelajaran dari Krisis*. Jakarta: Departemen Sosial RI
- Melly E. Tan, 1977, *Pengembangan Masyarakat di Miangas*. Jakarta: Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos Departemen Sosial RI
- Muttaqin, dkk. 2005. *Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat (Implementasi Model Pemberdayaan Pranata Sosial)*. Jakarta: Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos-Departemen Sosial RI.
- Suhendi, Ahmad; dan kawan-kawan. 2007. *Modul Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Mewujudkan Desa Berketahanan Sosial*. Jakarta: Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos-Departemen Sosial RI.
- Suhendi, Ahmad; Ani Wuryandari; dan Endah Triyati. 2007. *Replikasi Model Desa Berketahanan Sosial Melalui Pemberdayaan Pranata Sosial (di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)*. Jakarta: Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos-Departemen Sosial RI.
- Sukoco, Dwi Heru. 2002. *Ketahanan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Pusdiklat Pegawai Departemen Sosial RI.
- Sutrisno Hadi, 2004, *Metodologi Research 4*, Yogyakarta, Penerbit ANDI